PENYIDIK-PNS

2016

PERDA SUKOHARJO NO. 04 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 04, TLD 2016/NO. 228

KABUPATEN SUKOHARJO: 13 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

ABSTRAK :

- Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan jaminan kepastian penegakan hukum di daerah;
- Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat di daerah, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah;
- Sesuai ketentuan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah guna memberikan landasan dalam mewujudkan tertib hukum di daerah;
- Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950;

UU No. 8 Tahun 1981; UU NO. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 6 Tahun 2010; PP No. 43 Tahun 2012; Perpres No. 87 Tahun 2014; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2003; Permen No. 7 Tahun 2003; Permen Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011; Permen Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
  1. Ketentuan Umum;
  2. Kedudukan, Tugas dan Wewenang;
  3. Hak dan Kewajiban;
  4. Sekretariat PPNS;
  5. Pengangkatan, Perubahan Struktur dan Mutasi serta Pemberhentian PPNS;
  6. Kode Etik PPNS;
  7. Kartu Tanda Pengenal;
  8. Pelaksanaan Penyidikan;
  9. Pakaian Seragam dan Atribut PPNS;
  10. Pembinaan;
  11. Pembiayaan;
  12. Ketentuan Peralihan; dan
  13. Ketentuan Penutup.

CATATAN:
- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 2 Juli 2016
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Juli 2016